

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terletak pada jalur cincin api (*Ring of Fire*) dan pertemuan tiga lempeng yang saling bertumpukan. Hal ini menjadi alasan Indonesia sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Selain itu secara geografis letak Indonesia yang dilewati Garis Khatulistiwa dan diapit oleh dua benua mengakibatkan adanya pergolakan iklim yang di beberapa kesempatan dapat memicu bencana seperti gempa bumi, banjir, rob, longsor, kekeringan, abrasi, angin puting beliung, tsunami, dan lainnya.

Menyadari kenyataan bahwa Indonesia rawan akan bencana, maka kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menegaskan bahwa mitigasi bencana menjadi prioritas utama dalam penyusunan suatu rencana tata ruang. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menyadari dan memahami tentang kerawanan bencana dan fenomena bencana alam itu sendiri guna menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Jepang telah membuktikan hal tersebut pada tahun 2011. Mereka membuktikan kesiapan pemerintah bersama dengan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami tahun 2011 di wilayah pesisir pantai Sanriku dengan ketinggian gelombang sekitar 20 meter yang telah menghancurkan wilayah itu, meskipun demikian hebatnya tsunami tersebut namun hanya memakan sedikit korban jiwa. Indonesia pernah juga mengalami hal serupa yaitu tsunami pada 26 Desember 2004 yang menghantam kawasan pesisir Nangroe Aceh Darusalam. Namun berbeda dengan Jepang yang sangat siap dalam menghadapi bencana, justru di tsunami aceh tahun 2004 dapat menelan nyawa sekitar 170.000 orang di aceh sendiri, dan 250.000 korban lainnya di 13 negara.

Selain itu pada 26 September 2019 lalu, juga terjadi bencana gempa bumi yang mengguncang Provinsi Maluku. Daerah yang terdampak gempa yaitu Pulau Ambon, Pulau Seram, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan beberapa daerah di sekitarnya. Gempa ini berkekuatan 6,5 SR berpusat di 42 Km Timur Laut Kota Ambon, dengan kedalaman 10 Km. Berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

tahun 2019, tercatat ada lebih dari 1300 gempa susulan (terasa dan/atau tidak terasa) sejak gempa pertama pada 26 September lalu, kemudian jumlah korban meninggal sebanyak 39 jiwa, luka ringan sebanyak 1.578 jiwa, 170.900 penduduk mengungsi, dan 6.355 unit rumah rusak (rusak sedang dan rusak berat), dan banyaknya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang hancur akibat gempa.

Upaya mitigasi dan adaptasi merupakan aspek yang sangat krusial dan sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam tersebut. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik (pembangunan fisik alami dan/atau buatan) maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu upaya penanggulangan bencana menjadi sangat penting bagi setiap kawasan yang telah terjadi bencana. Kawasan rawan bencana sebaiknya dan seharusnya tidak dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, hal ini menjadi penting guna mengembangkan budaya keselamatan bagi warga masyarakat. Jika terpaksa ada pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana dimaksud, maka rumah dan bangunan yang dibangun harus dibangun dengan konsep ramah bencana.

Kota Ambon dan pada umumnya Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dan sekaligus wilayah pesisir. Kota Ambon terletak di Pulau Ambon dan merupakan wilayah bermukim 371.650 jiwa dengan kepadatan penduduk 193,27 jiwa per Km² (Kota Ambon dalam Angka tahun 2019). Secara administrasi Kota Ambon terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon, dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Ke-lima kecamatan ini termasuk wilayah terdampak gempa bumi pada September 2019 lalu. Dalam segala aspek, perwujudan pembangunan daerah semestinya mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disahkan. Hal ini menjadi sangat penting, demikian juga dalam aspek kebencanaan khususnya bencana gempa bumi. Berkaca pada bencana gempa bumi yang telah terjadi dan memakan banyak korban jiwa serta kerusakan fasilitas, maka diperlukan adanya sebuah kesiapan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana. Berbicara tentang kesiapan tentunya bukan perkara mudah karena butuh kerja sama dari berbagai elemen di dalam kota, dan salah satu yang membuat kesiapan ini dapat terwujud yaitu jika perwujudan

pembangunannya mengacu hanya kepada dokumen perencanaan yang telah disahkan. Pembangunan sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan zonasi pembangunan pada dokumen perencanaan RTRW dan RZWP3K. Sinkronisasi antara RTRW dan RZWP3K ini dapat menjadi acuan dalam hal pembangunan khususnya aspek mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi.

1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan tata ruang sebagai salah satu unsur penting dalam tata ruang itu sendiri merupakan penyusunan strategi perencanaan demi mewujudkan sebuah tata ruang wilayah yang aman, nyaman dan juga berkelanjutan. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa mitigasi dan penanggulangan bencana merupakan aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan penanggulangan bencana merupakan hal yang wajib diterapkan. Data serta perencanaan secara deskripsi dan spasial pada aspek kebencanaan mulai dari letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan bencana alam lainnya merupakan hal wajib yang seharusnya dimiliki oleh setiap daerah, yang nantinya berfungsi sebagai acuan utama dalam implementasi perencanaan tata ruang.

Dalam implementasi pembangunan sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana, sangat diperlukan integrasi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dalam implementasi pembangunan sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana diperlukan juga tindakan pembangunan yang mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disahkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi pembangunan sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Ambon dengan menggunakan analisis integrasi antar dokumen perencanaan yaitu RTRW dan RZWP3K Kota Ambon, kemudian diintegrasikan dengan Penggunaan Lahan dan Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Ambon yang merupakan wilayah penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan dalam aspek penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Ambon sesuai dengan RTRW dan RZWP3K Kota Ambon?

2. Bagaimana implementasi kebijakan melalui integrasi RTRW dan RZWP3K Kota Ambon terhadap Penggunaan Lahan eksisting dalam aspek mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi?
3. Bagaimana implementasi rencana pembangunan beserta sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Ambon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kebijakan pembangunan dalam aspek penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Ambon berdasarkan RTRW dan RZWP3K Kota Ambon.
2. Mengidentifikasi serta mengevaluasi implementasi kebijakan melalui integrasi RTRW dan RZWP3K Kota Ambon terhadap penggunaan lahan eksisting dalam aspek mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi.
3. Mengevaluasi serta mengidentifikasi implementasi rencana pembangunan beserta sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Ambon.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang dapat dilihat dalam penjabaran di bawah ini :

1.4.1 Manfaat Empiris

Secara empiris hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih memahami dan menerapkan ilmu perencanaan wilayah dan kota yang telah dipelajari untuk menyelesaikan penelitian ini, dan menambah pengetahuan mengenai evaluasi rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan khususnya pada aspek pembangunan sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi, mengetahui lebih dalam tentang pentingnya pengembangan dan fungsi mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi wilayah perkotaan, serta sebagai syarat

memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, di Universitas Esa Unggul.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi gambaran umum mengenai pembangunan sarana penunjang mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi serta menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang evaluasi rencana tata ruang dan implementasi pembangunan pada aspek mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

1.4.2 Mafaat Praktis

Manfaat bagi pemerintah daerah dan perangkat – perangkat pemerintah (instansi–instansi terkait) yaitu sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan dan mensinergikan antar dokumen rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kota Ambon, kemudian diintegrasikan dan dievaluasi kembali bersama penggunaan lahan eksisting agar dalam pengimplementasian perencanaan tata ruang lebih terintegrasi satu sama lain dan lebih terarah seperti yang termuat di dalam rencana tata ruang yang telah disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

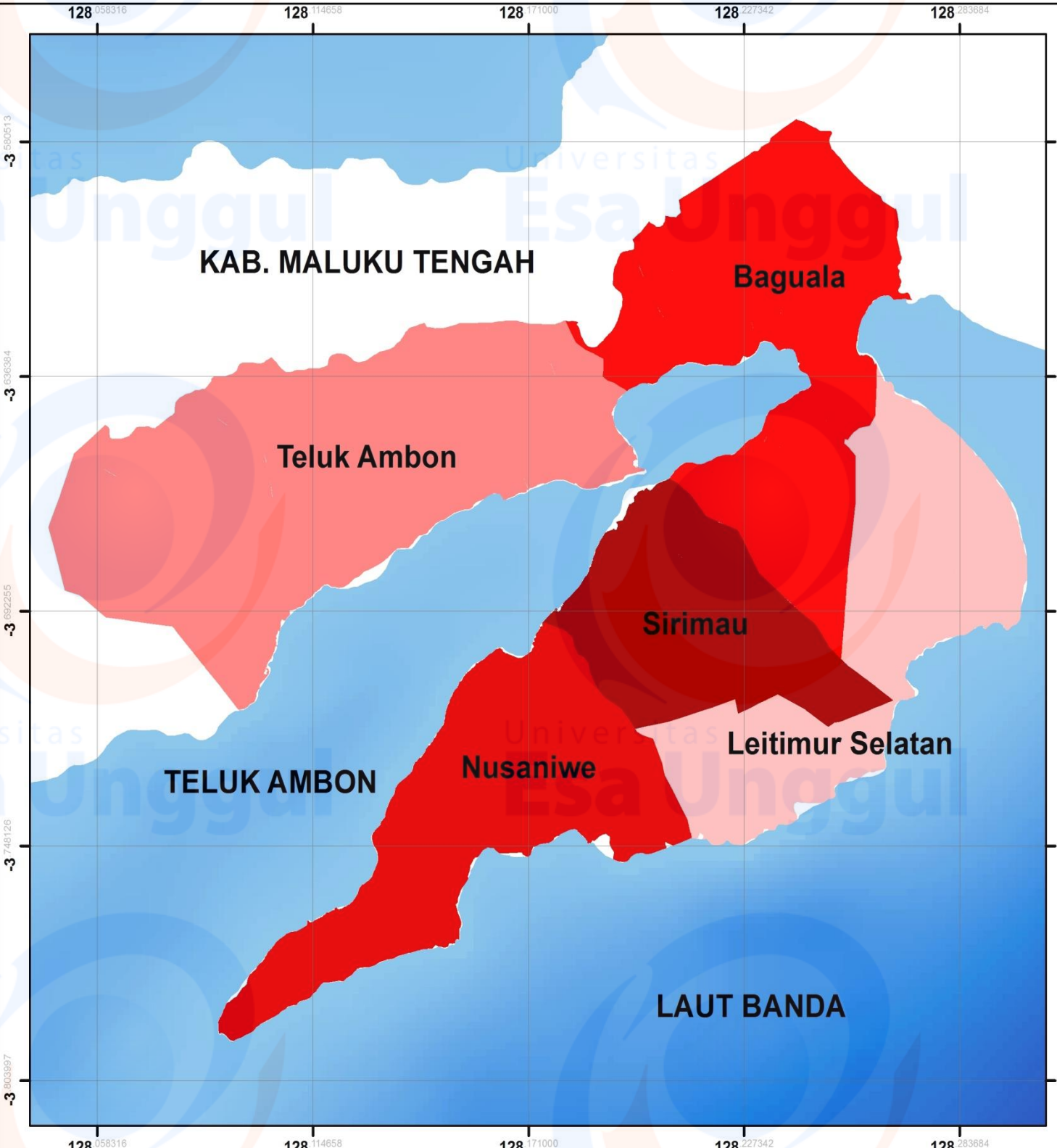
Lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kota Ambon terletak di Provinsi Maluku yang secara administrasi dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila, Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan : Laut Banda.
- Sebelah Barat : Petuanan Desa Hatu, Kabupaten Maluku Tengah.

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Untuk menjelaskan batasan substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga tidak terlalu jauh dari kajian masalah yang dipaparkan oleh peneliti, maka pembahasan pada penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa elemen sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
 - Peta Batas Administrasi Kota Ambon,
 - Peta Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031,
 - Peta Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RZWP3K Kota Ambon Tahun 2015-2035,
 - Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Ambon Tahun 2018/2019,
 - Peta Eksisting Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2018/2019,
 - Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031,
 - Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Ambon Tahun 2015-2035.
2. Wilayah studi penelitian ini yaitu Kota Ambon, Provinsi Maluku..
3. Penelitian ini difokuskan terhadap evaluasi implementasi pembangunan sarana mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Ambon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kota Ambon yang telah disinergikan dengan integrasi Penggunaan Lahan Eksisting Kota Ambon.



PETA BATAS ADMINISTRASI KOTA AMBON

1:150,000
 Ukuran Kertas A3

Legenda

Nama Kecamatan

- LEITIMUR SELATAN
- TELUK AMBON
- BAGUALA
- NUSANIWE
- SIRIMAU

Jermia Oktovianus Sobalely
 NIM. 20160202014
 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
 Universitas Esa Unggul

Inset Peta

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar

Sumber Peta :
 - Badan Perencanaan Daerah Kota Ambon
 - Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2019